

SIARAN PERS

Rilis Survei Nasional: Menyusun Peta Jalan Menghadapi Gangguan Informasi di Era AI Generatif

Auditorium CSIS, 16 Januari 2025



Dari kiri ke kanan: Beltsazar Krisetya (CSIS), Noudhy Valdryno (Kantor Komunikasi Kepresidenan), Bhredipta Socarana (SAIL), Arya Fernandes (CSIS), Shafiah Muhibat (CSIS), Ninik Rahayu (Dewan Pers), Aries Kusdaryono (Kementerian Komunikasi dan Digital RI), Agung Yudhawiranata (Blue Owl Group), Laban Laisila (Naras)

Jakarta, 16 Januari 2025 - Safer Internet Lab, sebuah inisiatif kolaborasi antara CSIS dan Google untuk melawan gangguan informasi, merilis dua laporan survei nasional yang menggambarkan kondisi tata kelola informasi di Indonesia. Kedua survei tersebut diluncurkan melalui acara yang bertajuk “Rilis Survei Nasional: Menyusun Peta Jalan Menghadapi Gangguan Informasi di Era AI Generatif” di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat.

Survei Nasional Opini Publik: “Peta Mis/Disinformasi dalam Politik Indonesia: Tingkat Kepercayaan dan Kerentanan Publik”

Survei ini dilaksanakan pada periode 31 Oktober-7 November 2024 secara tatap muka dengan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki *margin of error* sebesar +/-2,8%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam survei ini, kami menemukan adanya peningkatan pada kepercayaan publik terhadap gangguan informasi pemilu pada saat survei dilakukan setelah pemilu, dibandingkan survei pada sebelum pemilu. Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Volume gangguan informasi meningkat di masa pemilu. Meskipun upaya pengecekan fakta sudah meningkat, masih adanya kesulitan dalam mengimbangi laju penyebaran mis/disinformasi.
- b. Ketahanan informasi publik, yang diukur dari kemampuan memverifikasi informasi salah, tidak mengalami peningkatan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan mis/disinformasi masih tergolong rendah.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, juga menyampaikan meskipun kepercayaan terhadap gangguan informasi tinggi, namun dampaknya tidak sebesar Pemilu 2019 lalu. Dampak yang rendah itu terlihat dari tidak besarnya polarisasi di masyarakat, menurunnya penyebaran ujian kebencian dalam pemilu, rendahnya penggunaan politik identitas, dan penerimaan calon yang kalah terhadap hasil pemilu.

“Lemahnya dampak gangguan informasi bisa juga dipengaruhi oleh adanya konsensus di kalangan elit untuk berkampanye sehat, peran perusahaan platform teknologi dalam menanggulangi gangguan informasi, serta peran dari media/lembaga pencari fakta,” tambah Arya.

Survei Pemangku Kepentingan: “Persepsi, Pengalaman, dan Rekomendasi Pemangku Kepentingan terkait Mis/Disinformasi dan Tata Kelola Informasi”

Selain survei opini publik, kami juga melakukan survei terhadap berbagai pemangku kepentingan. Survei ini dilaksanakan pada periode 15 November-30 Desember 2024 dengan mewawancarai 189 responden yang mewakili berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam tata kelola informasi di Indonesia, meliputi pemerintah, platform teknologi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan media massa.

Hasil survei mengungkapkan bahwa pemeriksaan fakta, pemberdayaan komunitas, serta edukasi dan peningkatan *awareness* dianggap sebagai langkah paling efektif untuk menanggulangi mis/disinformasi. Sebaliknya, regulasi dan penegakan hukum serta transparansi politik relatif dianggap berjalan tidak efektif dalam menanggulangi mis/disinformasi pada Pemilu 2024.

Selain itu, ada pula beberapa catatan dalam upaya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam menanggulangi misinformasi/disinformasi. Dari perlunya kesepakatan

bersama mengenai definisi misinformasi/disinformasi hingga sarana dialog yang lebih efektif antar pemangku kepentingan.

Mengenai upaya menangani konten misinformasi/disinformasi, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Beltsazar Krisetya, juga menyampaikan “Verifikasi dan pemeriksaan fakta masih dianggap sebagai salah satu langkah yang paling efektif untuk menanggulangi misinformasi/disinformasi. Untuk meningkatkan efektivitas, langkah ini perlu ditunjang (bukan digantikan) dengan langkah-langkah lain seperti *community notes* dan *AI transparency*.”

Selain itu, regulasi yang mengatur transparansi penggunaan AI juga perlu dirancang dengan menyeimbangkan pendekatan berbasis risiko, sektoral, atau hak asasi manusia. Pemerintah juga diharapkan dapat menerapkan praktik baik dan pembelajaran dari pemilu 2024 ke dalam kebijakan-kebijakannya yang baru.

Acara rilis survei dibuka oleh sambutan dari Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi, CSIS, Shafiah Muhibat. Dalam sambutannya, Shafiah menyoroti bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan mengubah lanskap informasi, terutama dalam produksi konten misinformasi/disinformasi. CSIS pun menyadari pentingnya memberi perhatian terhadap isu ini karena meningkatnya produksi konten mis- dan disinformasi berbasis AI dapat meningkatkan kerentanan publik terhadap gangguan informasi. Kekhawatiran ini menjadi alasan bagi CSIS dan Safer Internet Lab untuk menyelenggarakan survei dan diskusi ini.

“Kami berharap baik survei maupun diskusi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk merumuskan peta jalan bersama dan membangun resiliensi publik dalam menghadapi tantangan misinformasi/disinformasi di era AI generatif”, kata Shafiah.

Aries Kusdaryono, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang turut hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan kekhawatiran pihak Kementerian karena kehadiran AI. Hadirnya AI generatif membawa beberapa dampak terhadap isu misinformasi:

- a. Meningkatnya kuantitas misinformasi/disinformasi
- b. Meningkatnya kualitas misinformasi jadi lebih persuasif dan sulit dibantah atau diverifikasi.
- c. Personalisasi misinformasi sesuai preferensi audiens, yang dapat meningkatkan daya persuasinya.
- d. Pembuatan informasi yang tampak masuk akal tapi tidak akurat.

“Pasca pemilu 2024 masyarakat masih menghadapi kerentanan terhadap manipulasi informasi. Sebanyak 87% penduduk di negara-negara yang mengadakan pemilu di tahun 2024 percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi politik di negaranya.”, ujar Aries

Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengapresiasi upaya SAIL dalam memerangi gangguan informasi melalui riset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Acara ini juga mendiskusikan isu-isu strategis yang menjadi temuan utama dalam survei. Diskusi dimoderatori oleh Laban Laisila, Kepala Narasi Newsroom dan Narasi Academy dengan panel yang terdiri dari: Noudhy Valdryno (Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan), Bhredipta Socarana (Peneliti Mitra, Safer Internet Lab), Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers), dan Agung Yudhawiranata (Senior Advisor, Blue Owl Group).

Sesi diskusi menyoroti beberapa hal penting terkait langkah krusial dalam kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan informasi publik. Mulai dari integrasi regulasi hingga forum diskusi yang efektif sehingga dapat membuka sekat-sekat formal dalam bertukar pikiran. Selain itu, panelis juga menyoroti pemanfaatan AI sebagai alat yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Laporan studi dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://sail.ink/surveipublik24> dan <https://sail.ink/surveiahli24>. Liputan acara dapat diakses melalui saluran YouTube Safer Internet Lab atau langsung melalui tautan berikut: <https://sail.ink/ytsurvei>.

Tentang SAIL:

Safer Internet Lab (SAIL) adalah inisiatif bersama oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Google Indonesia, yang bertujuan untuk melawan gangguan informasi melalui penelitian kolaboratif dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Kami bertujuan untuk memahami penyebaran disinformasi dan peran platform teknologi dalam hal ini, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan dan pemeriksa fakta untuk memelihara kepercayaan publik.

Kontak:

Safer Internet Lab (SAIL)

Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27, Jakarta 10160, Indonesia

Email: secretariat@saferinternetlab.org

Website: saferinternetlab.org



saferinternetlab.org



secretariat@saferinternetlab.org



Pakarti Centre Building

Jl. Tanah Abang III No. 23 - 27
Central Jakarta, DKI Jakarta 10160